



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: CSIS, AMPU, SMERU, SKALA, SEJAJAR, PUJIONO CENTER, AMCOLABORA, ACT (Aksi Cepat Tanggap), dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Kamis, 17 September 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Urgensi pengaturan Revisi UU No. 24 Tahun 2007 : Peran Masyarakat dalam Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - 2. Permasalahan dan Alternatif Solusinya.
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si..
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 23 dari 26 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Tentang Penanggulangan Bencana. 2. 3 Orang Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pimpinan Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB), The SMERU Research Institute, Pimpinan Sekretariat Jaringan Antar Jaringan OMS-LSM (SEJAJAR), Pimpinan Pujiono Center, Pimpinan AMCOLABORA Learning and Research Institute, Pimpinan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Pimpinan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi YAPPIKA, Koordinator Pokja

Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas, Pimpinan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (PMBI)

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI H.Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Dalam Rapat Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana dengan berbagai Non-Government Organization (NGO) membahas **“Urgensi Pengaturan Revisi UU No. 24 Tahun 2007: Peran Masyarakat dalam Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”** dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana memberikan apresiasi atas kehadiran berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam sejumlah NGO untuk memberikan masukan bagi Revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana menerima masukan sebagai berikut:
  - A. Masukan dari Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte:
    - Urgensi: aspek kebaruan, antisipasi perubahan iklim, kerugian ekonomi, kesiapsiagaan bencana, ego-sektoral.
    - Peran masyarakat: harus mandiri, berketahanan dan berperan aktif.
    - Tata kelola bencana: memberikan insentif kepada swasta yang berkontribusi pada penanggulangan bencana.
    - Literasi tentang bencana: diperbanyak untuk membangun kesadaran
    - Isu lain: pengarusutamaan bencana non alam, penguatan worst-case multihazard scenario, inventarisasi data sejarah kebencanaan, konsolidasi kemitraan dan ketangguhan public-private, diplomasi bencana di luar negeri.

B. Masukan dari Pimpinan AMPU-PB Catur Sudiro

- Penguatan organisasi, penguatan kemitraan, penilaian capaian nasional dan penguatan forum multipihak di daerah.
- Penanggulangan bencana menjadi capaian dari kesadaran masyarakat yang luas.
- Sepuluh aspirasi organisasi masyarakat: paradigma yang matang dan mutakhir, penguatan kelembagaan, fungsi yang paripurna, pendanaan yang memadai, daerah yang mandiri dan tangguh, bisnis multitasking yang mumpuni, penetapan kedaruratan yang lugas, ormas yang berkompeten, kesetaraan yang inklusi dan pelibatan TNI.

C. Masukan dari Pimpinan YAPPIKA Indira Hapsari.

- Isu yang utama: pelokalan bantuan, perkuat ketangguhan masyarakat dan promosi terhadap kepemimpinan perempuan.
- Isu yang disoroti: perlu standar pelayanan minimum dalam layanan kebencanaan, kebijakan pengurangan bencana harus berperspektif gender, kearifan lokal dan perlindungan terhadap kelompok rentan, pelayanan kesehatan dan psikologis.

D. Masukan dari Pimpinan Amcolabora Learning and Research Institute Nukila Evanty.

- Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah belum bekerjasama dengan baik.
- Desa tangguh bencana, manajemen krisis, sekolah tahan bencana, relawan kebencanaan, filantropis OMS.
- Perlu pemetaan regulasi, akselerasi tupoksi Lembaga penanggulangan bencana di pusat dan daerah, restrukturisasi anggaran, pelatihan dan standar SDM kebencanaan.

E. Masukan dari Pimpinan MPBI Dandi

- Masukan sama dengan AMPU-PB

F. Masukan dari Pokja Nasional Disabilitas Yeni Rosa Damayanti.

- Suhardi Wiyanto: kapasitas penanggulangan bencana perlu ditingkatkan dan evakuasi bagi penyandang disabilitas belum aksesible, termasuk pemenuhan kebutuhan dan partisipasi yang bermakna. Untuk DIM perubahan sedang disusun.

- Edy Supriyanto: aksesabilitas informasi kebencanaan, lokasi pengungsian yang ramah disabilitas, dan partisipasi yang inklusif.
- Yeni Rosa: perlindungan bagi penyandang disabilitas pada saat terjadi bencana.

G. Masukan dari Pujiono Center, DR. Puji Pujiono

- Pemutakhiran paradigma (DIM 14-18), lebih pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
- Keadaan bencana dan status darurat (DIM 91, 106, 408), Pemerintah harus menetapkan.
- Perencanaan (DIM 306) harus sesuai dengan RPJMN/D
- Sistem kemanusiaan (DIM 528-530) perlu diatur secara kuat dalam RUU PB.
- Penanggulangan berbasis bukti (DIM 354) harus konkret.

H. Masukan dari Pimpinan ACT Wahyu:

- Bencana likuifaksi harus dinyatakan dalam RUU Penanggulangan Bencana karena merupakan bencana alam yang jumlah korbannya sulit untuk diketahui akibat ditelan bumi.
- Peta bencana harus diperkuat karena masyarakat tidak punya kapasitas untuk melakukan mitigasi bencana. Pemerintah harus melakukan mitigasi struktural dan kultural.

I. Masukan dari The SMERU Institute Rizki Filiali

- Masyarakat perlu melibatkan diri dalam penanggulangan bencana.
- Perlunya ketahanan bencana.

3. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana mencatat aspirasi dari para NGO untuk memperkuat kelembagaan BNPB dan BPBD di daerah-daerah serta mendesak pengalokasian anggaran yang memadai untuk penanggulangan bencana di APBN/APBD.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA PANJA,

  
DR. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.S